

## VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENT: SINERGI PERUSAHAAN DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN UMKM PEGOLAHAN LIMBAH IKAN DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

Kristianto<sup>1\*</sup>, Cyntya Sri Zuwanita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pertamina DPPU Juanda

\*korespondensi : [tian.kristianto24@gmail.com](mailto:tian.kristianto24@gmail.com)

### ABSTRACT

*Aquatic resources and marine products are the most significant economic potential in Kalanganyar Village. Therefore, development in this sector, such as local economic development with MSMEs, is the main direction in village development. This paper discusses the empowerment program carried out by Pertamina DPPU Juanda in developing MSMEs in Kalanganyar Village by using the participatory rural appraisal (PRA) method based on the Village-Driven Development approach. As a result, the community empowerment program that had been carried out has enabled the creation of two innovative products and the active involvement of each interest group. In addition, community empowerment was carried out using a village-driven development approach and was able to restore the position of the village government as a more democratic actor of development and basic-services.*

**Keywords:** *Micro Small and Medium Enterprises, Village-Driven Development, Community Empowerment*

### ABSTRAK

Sumber daya perairan dan hasil laut adalah potensi ekonomi terbesar yang ada di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu pengembangan pada sektor ini menjadi arah utama dalam pembangunan desa. Tulisan ini membahas program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pertamina DPPU Juanda dalam mengembangkan UMKM di Desa Kalanganyar yang dilaksanakan menggunakan metode *participatory rural appraisal* (PRA) yang berdasarkan pada pendekatan *village-driven development*. Hasilnya, program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mampu menciptakan dua produk inovasi dan tercipta keterlibatan aktif masing-masing kelompok kepentingan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan pendekatan *village driven development* mampu mengembalikan posisi pemerintah desa sebagai aktor pembangunan dan pelayanan dasar yang lebih demokratis.

**Kata kunci:** *Usaha Mikro Kecil Menengah, Village-Driven Development, Pemberdayaan Masyarakat*

### RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 11/08/2022

Diterima : 07/01/2023

Dipublikasikan : 02/04/2023

## PENDAHULUAN

Desa Kalanganyar merupakan salah satu desa di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data monografi Desa Kalanganyar, luas wilayah Desa Kalanganyar adalah 4.476 hektar atau kurang lebih 135.000 M<sup>2</sup>. Sekitar 3000 Ha lahan tersebut digunakan sebagai lahan tambak yang diketahui beberapa milik warga Desa Kalanganyar, dan sisanya disewakan kepada para pengusaha di luar desa (Rizkiyah, 2019).

Desa yang berada di wilayah selatan Kabupaten Sidoarjo ini sudah diproyeksikan menjadi salah satu desa wisata karena dinilai memiliki potensi wisata yang dapat menarik wisatawan berkunjung ke desa tersebut. Dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pemerintahan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2009, Desa Kalanganyar merupakan kawasan yang masuk dalam rencana pengembangan wilayah pesisir timur Kabupaten Sidoarjo dengan beberapa komponen daya tarik wisata diantaranya kolam pancing, wisata mangrove, wisata budaya kampung iwak, kuliner olahan ikan bandeng, dan sebagainya (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2009).

Di Desa Kalanganyar, terhampar area tambak yang ketika musim panen menghasilkan ikan bandeng dengan jumlah yang melimpah. Beberapa tambak ini juga dijadikan wisata pemancingan yang telah berhasil menarik wisatawan yang datang dari dalam dan luar Kabupaten Sidoarjo. Biasanya para pengunjung atau wisatawan tersebut memenuhi area pemancingan pada hari-hari libur untuk bersantai. Selain dijual mentah, ikan-ikan hasil tambak juga banyak diolah menjadi beragam olahan ikan bandeng khas Desa Kalanganyar. Terdapat juga usaha jasa cabut duri yang menjadi ciri khas unik Desa Kalanganyar. Kelompok tersebar di Desa Kalanganyar dan memudahkan penjualan ikan bandeng siap masak dengan dijual bersih dari duri dan sisik ikannya. Para pemancing dan kelompok usaha olahan ikan biasanya menggunakan jasa ini untuk memudahkan pengolahan ikan bandeng.

Pengelolaan daya tarik wisata khususnya dalam pengembangan potensi

masyarakat Desa Kalanganyar sangat diperlukan dalam rangka menarik minat wisatawan untuk berkunjung lebih lama dan lebih sering, sehingga akan terjadi peningkatan perekonomian masyarakat. Keunggulan ini sudah jelas dipahami oleh seluruh masyarakat termasuk pemerintahan desa, namun gerak yang dilakukan dalam pengembangan wisata tersebut masih sangat terbatas. Potensi yang sudah ada belum bisa terpetakan dengan baik. Menurut (Fikri & Febriana, 2018), Desa Kalanganyar dapat direkomendasikan sebagai ekowisata bahari. Hanya saja, masih kurang dalam hal penyajian daya tarik wisata sehingga masih terkesan biasa saja. Oleh karena itu, pengembangannya dapat diarahkan dengan penggunaan *branding* yang tepat. Memiliki *branding produk* serta strategi pemasaran yang tepat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan serta pendapatan para pelaku UMKM (Raharja & Natari, 2021). *Branding* dalam hal ini adalah memaksimalkan promosi potensi yang ada di Desa Kalanganyar bukan hanya usaha tambaknya saja melainkan potensi pendukung lain yang sebelumnya tidak terlihat tetapi memiliki peran besar dalam inovasi wisata.

Masuknya peran badan usaha yakni Pertamina DPPU Juanda ke Desa Kalanganyar terjadi karena keterbukaan pemerintah desa untuk bekerja sama dalam mengembangkan Desa Wisata Kalanganyar. Pertamina DPPU Juanda memiliki komitmen dalam memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar area operasi dengan melakukan program CSR berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal ini kemudian menjadi titik temu dengan komitmen desa untuk mengoptimalkan potensi dan mengurangi permasalahan di masyarakat. Pertemuan antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta diharapkan dapat mengintegrasikan potensi desa yang belum dikelola dan kelompok dalam masyarakat yang masih berjalan sendiri untuk mencapai tujuan bersama.

Komitmen tersebut kemudian termanifestasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pertamina DPPU Juanda melalui mekanisme pemanfaatan

dana *corporate social responsibility* (CSR). Salah satu program yang sudah berjalan adalah pengembangan UMKM yang berbasis pada pengolahan hasil utama Desa Kalanganyar yakni ikan dan hasil laut lainnya. Program pemberdayaan masyarakat tersebut dijalankan dengan paradigma yang secara aktif melibatkan pemerintah desa dan masyarakat penerima manfaat.

Pada sisi lain, lahirnya peraturan yang secara khusus mengatur tentang desa yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan paradigma pembangunan masyarakat pedesaan dari semula *Government Driven Development* atau *Community Driven Development* (CDD) menuju *Village Driven Development* (VDD) (Sutoro, 2015). Sementara itu konsep pembangunan berkelanjutan yang berkembang juga memaksa perusahaan untuk beradaptasi dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui CSR. Konsep tersebut membawa variabel ekonomi dan sosial harus menyesuaikan dengan kapasitas lingkungan yang ada (Mariana, Sukasmanto, Angga, Rinandari, & Latifah, 2021). Kapasitas lingkungan inilah yang kemudian mengarah pada keberadaan institusi desa yang menjadi titik fokus pada paradigma pembangunan masyarakat pedesaan *Village Driven Development*.

Pada konsep *Village Driven Development*, keberhasilan program CSR dalam mengembangkan ekonomi lokal ditentukan oleh strategi pemberdayaan masyarakat yang kuat antar berbagai aktor seperti sinergi antara perusahaan dengan berbagai aktor yang ada di lingkungan masyarakat seperti institusi desa/kelurahan, lembaga ekonomi lokal, dan masyarakat itu sendiri (Mariana, Sukasmanto, Angga, Rinandari, & Latifah, 2021). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dalam perspektif VDD mekanisme atas pengambilan keputusan dilakukan dalam mekanisme deliberasi yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah desa dalam forum yang terintegrasi. Dalam kata lain, VDD berupaya mengembalikan posisi pemerintah desa sebagai aktor pembangunan dan pelayanan dasar yang lebih demokratis

(Edi, Anwar, & Angga, 2015) dan mensyaratkan adanya sinergi antara institusi desa sebagai representasi negara di tingkat lokal, kelompok warga, dan juga perusahaan (Mariana, Sukasmanto, Angga, Rinandari, & Latifah, 2021). Kinerja institusi desa yang lebih demokratis tersebut juga memberikan pengaruh pada kualitas dalam pengembangan ekonomi lokal (Sudjito, et al., 2020).

Konsep tersebut berbeda dengan paradigma pembangunan masyarakat yang sebelumnya berkembang yakni *Community Driven Development* (CDD). Konsep CDD dalam CSR berarti mengarahkan pada hubungan langsung antara perusahaan dan masyarakat di mana terjadi pengalihan kontrol sumber daya dan kegiatan kepada masyarakat sekaligus berupaya membawa lingkungan yang inklusif, transparan, dan partisipatif dalam pengambilan keputusan (Casey, 2018). CDD telah menjadi konsep global yang banyak diadaptasi sebagai proses pemberdayaan dan pembangunan sosial ekonomi yang diidentifikasi sebagai sarana ampuh untuk pengurangan kemiskinan (Saguin, 2018). Salah satu bentuk VDD yang pernah diadaptasi dan diterapkan secara masif di pedesaan Indonesia adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

Penerapan konsep CDD dalam pembangunan pedesaan akan tepat dilaksanakan ketika desa dalam bentuk pemerintahan semu. Tetapi sekarang di era ketika UU Desa sudah mendudukan desa sebagai entitas yang memiliki peran penting dalam pembangunan desa maka konsep pembangunan desa CDD lebih baik digantikan dengan konsep VDD (Sutoro, 2015).

Berdasarkan kerangka VDD yang dikemukakan oleh Institute of Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, perusahaan melalui program CSR dapat memberikan dukungan melalui dua hal, yakni (1) mendukung penguatan kapasitas pemerintahan desa (SDM, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat), dan (2) mendukung upaya peningkatan aset desa dalam pengembangan ekonomi lokal.



**Gambar 1. Posisi CSR dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Desa/Kelurahan**  
(Sumber: IRE Yogyakarta, 2021)

Hadirnya perusahaan dalam program CSR dan penjelasan paradigma CDD yang mengukur keberhasilan dari partisipasi kelompok dan kurang melibatkan pemerintah desa dalam prosesnya. Oleh karena itu, dengan menggunakan konsep VDD, tulisan ini berusaha mendeskripsikan bentuk sinergi dan keterlibatan pemerintah desa dan perusahaan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berupa pengembangan UMKM di Desa Kalanganyar yang dilakukan oleh PT Pertamina DPPU Juanda.

## METODE

Program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh PT Pertamina DPPU Juanda di Desa Kalanganyar menggunakan metode *participatory rural appraisal* (PRA). Metode *participatory rural appraisal* (PRA) menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat (Lestari, Santoso, & Mulyana, 2020). Masyarakat didorong untuk secara kolektif menganalisis masalah kehidupan untuk kemudian dapat merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata (Rifai, Santoso, & Asiah, 2020). Metode ini lahir sebagai pengembangan dari metode terdahulu atas sebuah kritik yang menyatakan bahwa dalam pembangunan, masyarakat sering kali hanya dijadikan sebagai objek bukan subjek (Chambers, 1992) dalam (Yudha, 2019).

Metode ini menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai objek yang menerima pembangunan tetapi juga menjadi subjek pembangunan yang terlibat dalam perancangan

program dengan aktif pada proses perencanaan, penentuan prioritas, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemanfaatan dari hasil program (Hudayana, et al., 2019). Tujuan menggunakan metode PRA adalah untuk mendapatkan gambaran masalah, potensi, dan kebutuhan masyarakat (Putri, Irfan, & Santoso, 2020). Adapun teknik yang dilakukan dalam program pengembangan UMKM ini berupa penyusunan dokumen pemetaan sosial, rencana strategis dan rencana kerja serta kegiatan implementasi bersama pemerintah desa dan kelompok sasaran berupa *focus group discussion*, penentuan prioritas, pelatihan dan pendampingan kelompok, pemberian peralatan dan perlengkapan, pembangunan fasilitas publik, serta kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu Januari 2021-Maret 2022 di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Pada tahap pelatihan dan pendampingan kelompok pada pelaksanaan program CSR, perusahaan menggandeng fasilitator yang berasal dari luar perusahaan dan luar desa yakni peneliti dan praktisi. Fasilitator tersebut berperan sebagai orang yang melakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat mengenai ilmu baru dan sebagai jembatan penghubung antara pihak luar dan pihak dalam masyarakat itu sendiri.



**Gambar 2. Tiga Komponen Kunci dalam PRA**

Sumber: Koralagama, Wijeratne, & Silva, 2007

Terdapat 3 (tiga) komponen kunci dalam metode *participatory rural appraisal* seperti yang dijelaskan oleh (Koralagama,

Wijeratne, & Silva, 2007) yaitu institusi sumber daya, institusi fasilitator, dan masyarakat. Dalam tulisan ini, institusi sumber daya adalah Pertamina DPPU Juanda, institusi fasilitator adalah Pemerintah Desa Kalanganyar & CV Kreatif Indah Alam, dan masyarakat adalah masyarakat Desa Kalanganyar khususnya anggota kelompok Olikan & Kece.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat melalui program CSR Pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Pertamina DPPU Juanda di Desa Kalanganyar telah memasuki tahun kedua dan telah melalui berbagai proses pendampingan. Adapun proses tersebut terbagi ke dalam beberapa tahapan, di antaranya tahap perencanaan program, implementasi, *monitoring* dan evaluasi program. Kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan adalah sebagai berikut:

### A. Tahapan Perencanaan Program

Bagi perusahaan, merencanakan program CSR dengan baik merupakan langkah penting untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam tahapan ini, DPPU Juanda melakukan beberapa strategi. Strategi pertama adalah perencanaan program yang dimulai dengan pendekatan kepada pemerintah desa. Pendekatan ini dirasa sangat perlu karena pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis, dengan strategi ini diharapkan program yang akan dilaksanakan dapat sesuai dengan arah pembangunan desa yang telah ditetapkan dan dapat diimplementasikan dengan lebih mudah. Hasil diskusi dengan pemerintah desa mengarah pada rencana pengembangan desa wisata dan beberapa kendala yang harus diselesaikan dalam prosesnya. Selanjutnya, untuk lebih mengenal dan mendapatkan informasi mendalam terkait potensi dan permasalahan di desa, DPPU Juanda juga melakukan pemetaan sosial (*social mapping*) dan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan pemerintah desa, kelompok atau organisasi yang berada di Desa Kalanganyar, serta masyarakat desa yang

diwakili oleh ketua RT setempat. Hasil rekomendasi pemetaan sosial untuk wilayah Desa Kalanganyar di antaranya adalah pengembangan desa wisata dengan program pendukung yakni pengembangan UMKM lokal, peningkatan kapasitas kelompok, dan inovasi program untuk mengenalkan ciri khas Desa Kalanganyar.

Pemerintahan Desa menyatakan bahwa Desa Kalanganyar adalah Desa yang penuh potensi wisata dan juga potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Pihak desa menekankan bahwa sebagian besar pendapatan desa diperoleh dari hasil tambak, pemancingan, dan industri pengolahan ikan yang ada di Desa Kalanganyar. Jumlah wirausaha di desa ini juga semakin meningkat termasuk jumlah jasa cabut duri. Namun, di balik potensi itu, masih ada masalah yang harus diselesaikan terkait pembuangan limbah sisa produksi olahan ikan seperti sisik dan duri ikan bandeng yang tidak bisa diolah. Biasanya limbah tersebut dibuang begitu saja dan menumpuk di beberapa daerah di Desa Kalanganyar. Bau dan pemandangan yang tidak elok menjadi masalah utama masyarakat. Oleh karena itu, program penanganan limbah ini menjadi salah satu program prioritas yang akan dilaksanakan.

### B. Tahap Implementasi

#### *Launching Program dan Pembentukan kelompok*

*Launching Program* Kalanganyar Sentris Berseri dilaksanakan di Kantor Desa Kalanganyar yang dihadiri oleh Kepala Desa Kalanganyar, perwakilan pekerja Pertamina, pelatih program, CV Kreatif Indah Alam dan sebanyak 20 orang peserta yang berminat untuk mengikuti program. Dalam susunan acara *launching* juga dilakukan pembentukan atau pengukuhan kelompok yang terbagi menjadi 2 kelompok yakni kelompok UMKM pengolahan limbah ikan (kelompok Olikan) dan kelompok kerajinan handicraft dari limbah kulit kerang (kelompok KeCe). Dalam pembentukan kelompok ini, ada peran kepala desa dan ketua PKK yang membuat kriteria dan membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk

bergabung menjadi bagian dari anggota kelompok.

#### **Pengadaan Peralatan Penunjang Kegiatan**

Pengadaan peralatan untuk menunjang kegiatan produksi baik pengolahan limbah ikan, maupun untuk membuat kerajinan dari bahan kerang. Pengadaan peralatan ini dilakukan bertahap. Untuk tahap awal, peralatan yang diberikan adalah peralatan yang umum digunakan, selanjutnya peralatan diberikan menyesuaikan kebutuhan kelompok yang dilihat dari hasil *monitoring* rutin terhadap perkembangan program.

#### **Pembangunan Kanopi**

Berdasarkan permohonan pemerintah desa untuk menunjang pengembangan UMKM di Desa Kalanganyar. Bantuan fasilitas publik ini dimaksudkan untuk mendukung UMKM yang ada di Desa Kalanganyar sehingga memiliki tempat untuk berjual beli di desa tersebut. Kanopi ini telah digunakan untuk kegiatan Bazar Ramadhan dan harapannya akan mendukung kegiatan lainnya di Desa Kalanganyar.

#### **Pelatihan Pengolahan Produk**

Pada kesempatan ini PT Pertamina (Persero) DPPU Juanda bekerja sama dengan CV Kreatif Indah Alam sebagai instruktur yang memberikan pemahaman mulai dari pelatihan produksi, manajemen usaha, sampai dengan pelatihan *packaging* dan *digital marketing*. Untuk 2 kelompok yang sudah dibentuk, pelatihan produksi dilakukan di hari yang berbeda sehingga bisa lebih fokus. Untuk pelatihan produksi pengolahan limbah ikan dan pembuatan kerajinan *handicraft* dilakukan sebanyak 2 kali untuk masing-masing kelompok dengan materi produk yang berbeda.

#### **Pelatihan Packaging Produk dan Digital Marketing**

Pelatihan *packaging* dan *digital marketing* dilakukan pada hari yang bersamaan dengan 3 pemateri yang berbeda. Pemasaran digital merujuk kepada penggunaan beragam platform di internet yang sebagai sarana untuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM (Ririd, Vista, Sabilla, Dien, & Asmara,

2022). Pelatihan ini menitikberatkan pada pengetahuan anggota kelompok terkait promosi produk baik *online* maupun *offline*, pengetahuan tentang platform penjualan *online* (Instagram, Facebook, dan *e-commerce* lainnya). Sementara pelatihan *packaging* dikhususkan untuk anggota kelompok pembuat kerajinan kulit kerang.

#### **Gelar Produk UMKM Olikan dan KeCe**

Kegiatan ini dilaksanakan setelah semua kegiatan pelatihan dan uji coba produksi selesai dilaksanakan di tahun 2021 ini. Gelar produk UKM binaan PT Pertamina DPPU Juanda bertujuan untuk mengenalkan produk perdana yang dibuat oleh kelompok Olikan dan kelompok KeCe yakni olahan makanan maupun hasil kerajinan tangan dari kulit kerang kepada masyarakat, khususnya para *stakeholder* yang ada di Desa Kalanganyar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang ketua Asosiasi Makanan dan Minuman Kabupaten Sidoarjo (Asmaminda), BUMDes Kalanganyar, BPD, dan PKK Desa Kalanganyar.

#### **C. Tahap Monitoring dan Evaluasi**

*Monitoring* dilakukan setiap satu bulan sekali dengan tujuan memastikan produksi tetap berjalan. *Monitoring* ini juga guna melihat kebutuhan program. Sementara untuk evaluasi program, dilaksanakan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pertemuan yang dilakukan pada akhir kegiatan yakni pada bulan September 2021 dengan tujuan untuk melihat keberhasilan implementasi program dan menjadi acuan untuk memperbaiki program yang sudah berjalan sebelumnya. Adapun dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi dari seluruh anggota kelompok, pemerintah desa, tim Kreatif Indah Alam (KIA) sebagai pendamping program di lapangan.

#### **Diskusi:**

*Village driven development* secara konseptual merupakan metode pemberdayaan masyarakat melalui strategi *engagement*. Artinya, strategi *engagement* mengedepankan pada keterlibatan aktif setiap aktor dalam pemberdayaan. Dalam konteks pengembangan UMKM di Desa Kalanganyar melalui program CSR Pertamina DPPU Juanda, aktor-aktor

selain perusahaan yang dominan adalah pemerintah desa dan masyarakat. Maka kedua aktor tersebut menjadi subjek utama dalam program yang dijalankan. Hal tersebut dapat dilihat melalui program pengembangan UMKM yang melibatkan Pemerintah Desa Kalanganyar, termasuk organisasi lembaga usaha/*enterprise* lokal yang berada di tingkat desa, dan masyarakat secara aktif.

Perusahaan, dalam hal ini Pertamina DPPU Juanda melalui program CSR, Pemerintah Desa Kalanganyar, dan masyarakat terlibat secara aktif dan memiliki posisi yang sejalan dengan konsep VDD yang dikembangkan oleh IRE. Pemerintah desa, sebagai representasi negara pada tingkat desa, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal. Tugas dan tanggung jawab tersebut salah satunya dilaksanakan melalui lembaga ekonomi lokal desa yakni Badan Usaha Milik Desa dan program pemberdayaan masyarakat yang menasar pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya dan potensi yang ada di sekitarnya. Sementara itu, salah satu tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan publik adalah peyediaan ruang publik yang aksesibel dan layanan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan ekonomi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalanganyar Makmur dalam pengembangan UMKM di Desa Kalanganyar ini memiliki peran sebagai lembaga ekonomi lokal yang dibentuk dan modalnya berasal dari penyertaan modal oleh pemerintah desa. Selain itu, BUMDes mendapatkan delegasi wewenang dari pemerintah desa untuk dapat melakukan kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik yang berkaitan dengan pemanfaatan aset desa dan layanan usaha yang dapat diakses oleh UMKM salah satunya dilakukan oleh BUMDes.



**Gambar 4. Posisi Perusahaan (CSR), Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Sinergi Pengembangan UMKM di Desa Kalanganyar**

(Sumber: Olahan Peneliti, 2022)

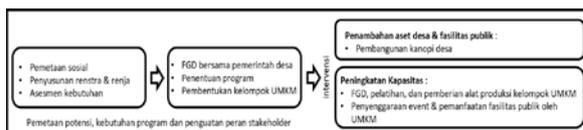
Sementara itu pada pihak perusahaan, dalam hal ini Pertamina DPPU Juanda, melalui mekanisme program CSR yang dijalankan memiliki posisi dan peran sebagai penguat institusi desa dan kelompok masyarakat. Koordinasi sejak awal program kepada pihak desa merupakan wujud bagaimana desa dikuatkan untuk dapat menjadi aktor dalam pembangunan desa. Perusahaan memberikan peningkatan aset desa yang kemudian dikelola oleh BUMDes dan dimanfaatkan salah satunya oleh kelompok UMKM binaan.

Sejalan dengan kerangka *village driven development* yang dikemukakan oleh IRE, Pertamina DPPU Juanda dalam menjalankan program CSR memberikan dukungan kepada pemerintah desa dan masyarakat melalui intervensi yang dilakukan, yakni (1) mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan (2) mendukung upaya peningkatan aset desa.

Dukungan terhadap penguatan kapasitas ditunjukkan dengan adanya program pengembangan kelompok UMKM yang bergerak pada pengolahan limbah ikan dan hasil laut lainnya yakni kelompok Olikan dan kelompok KeCe. Kedua kelompok tersebut lahir dari rangkaian proses yang melibatkan ketiga pihak sekaligus yakni perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat. Pencanangan pengembangan kelompok UMKM pengolahan ikan berawal dari adanya potensi lokal yang tercantum dalam dokumen pemetaan sosial milik perusahaan dan dimusyawarahkan bersama pemerintah desa melalui *focus group discussion*.

Pada kegiatan *focus group discussion*, disepakati rencana program yang akan dijalankan berupa kegiatan fisik yakni penambahan fasilitas publik dan pengembangan

kelompok UMKM yang fokus utamanya adalah peningkatan kemampuan kelompok dalam pengolahan produk lokal. Dalam pengembangan kelompok UMKM tersebut, dilakukan intervensi berupa (1) pembentukan dan musyawarah keompok, (2) bantuan peralatan produksi dan pemasaran, (3) pelatihan pembuatan dan pengembangan produk, dan (4) gelar produk dan pameran. Kegiatan intervensi yang dilakukan tersebut bermuara pada peningkatan kapasitas kelompok UMKM Olikan dan KeCe.



**Gambar 4. Alur Intervensi Program Pengembangan UMKM di Desa Kalanganyar**

(Sumber: Olahan Peneliti, 2022)

Sementara itu, dalam dukungan untuk peningkatan aset desa, Pertamina DPPU Juanda dan Pemerintah Desa Kalanganyar bersinergi dalam pembangunan kanopi desa. Kanopi tersebut merupakan sarana fisik yang berfungsi sebagai fasilitas publik untuk pengembangan UMKM dan kegiatan-kegiatan desa seperti gelar seni, festival, dan kegiatan keagamaan. Pemerintah Desa Kalanganyar kemudian melakukan delegasi wewenang kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalanganyar Makmur sebagai entitas bisnis milik pemerintah desa untuk mengelola kanopi tersebut agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan usaha dan pelayanan publik. Kedua intervensi yang dilakukan oleh Pertamina DPPU Juanda tersebut, yakni dukungan peningkatan aset desa dan peningkatan kapasitas, merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan UMKM pengolahan limbah ikan di Desa Kalanganyar dengan penguatan peran pemerintah desa sekaligus keterlibatan masyarakat secara langsung.

## SIMPULAN

Program yang dilakukan Pertamina DPPU Juanda melalui mekanisme pelaksanaan

*corporate social responsibility* (CSR) dalam mengembangkan UMKM pengolahan limbah ikan di Desa Kalanganyar merupakan contoh penerapan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan *village driven development*. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya keterlibatan aktif masing-masing kelompok kepentingan yaitu Pemerintah Desa Kalanganyar, BUMDesa Kalanganyar Makmur, dan Kelompok UMKM. Pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan pendekatan *village driven development* mampu mengembalikan posisi pemerintah desa sebagai aktor pembangunan dan pelayanan dasar yang lebih demokratis. Selain itu dengan adanya program pengembangan UMKM yang bergerak di sektor pangan yakni kelompok Olikan dan sektor kerajinan yakni kelompok Kece, mampu memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Casey, K. (2018). Radical Decentralization: Does Community-Driven Development Work? *The Annual Review of Economics*, 10(1), 139-163.
- Edi, A., Anwar, M., & Angga, R. D. (2015). Menjadi Katalis Pembangunan Desa: Pengalaman Implementasi Pembangunan Berbasis Aset dari Indonesia Timur. *Jurnal Analisis Sosial*, 19(2), 146-167.
- Fikri, M., & Febriana, P. (2018). Branding Desa Wisata Bahari di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 61-74.
- Hudayana, B., Kutaneegara, P. M., Setiadi, Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., F.N, M. D., Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, 2(2), 99-112.
- Koralagama, D., Wijeratne, M., & Silva, W. D. (2007). Emergence of Participatory Rural Appraisal (PRA) Technique as a Strategy towards Sustainable Development: A Sri Lankan Experience. *Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics*, 108, 149-160.

- Lestari, M. A., Santoso, M. B., & Mulyana, N. (2020). Penerapan Teknik Participatory Rural Appraisal dalam Menangani Permasalahan Sampah. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 1(1), 55-61.
- Mariana, D., Sukasmanto, Angga, R. D., Rinandari, H., & Latifah, D. A. (2021). *Kebangkitan Layanan Dasar di Delta Mahakam : Sinergi Program CSR Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: IRE.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2009). *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029*. Sidoarjo.
- Putri, B. G. R., Irfan, M., & Santoso, M. B. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Pentingnya Melanjutkan Pendidikan Terhadap Anak dan Remaja Putus Sekolah di RT 04/RW 05 Kelurahan Kebon Kangkung Kota Bandung. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 149–157.
- Raharja, S. J., & Natari, S. U. (2021). PENGEMBANGAN USAHA UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN MEDIA DIGITAL. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 108 – 123.
- Rifai, A. A., Santoso, M. B., & Asiah, D. H. S. (2020). Inisiasi Pembentukan Bank Sampah Berbasis Zero Waste Di RW 06 Desa Majasetra Kabupaten Bandung. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 213–220. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27119>
- Ririd, A. R. T. H., Vista, C. B., Sabilla, W. I., Dien, H. E., & Asmara, R. A. (2022). WORKSHOP OPTIMALISASI DIGITAL MARKETING UNTUK PELAKU UMKM PADA LAPAK BERKAH PKK, DI DESA TOYOMARTO SINGOSARI, KABUPATEN MALANG. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 149–155.
- Rizkiyah, T. A. (2019). *Pemberdayaan Perempuan Buruh Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. Retrieved from Digilib Uinsby.
- Saguin, K. (2018). Why the poor do not benefit from community-driven development: Lessons from participatory budgeting. *World Development*, 112(2018), 220-232.
- Sudjito, A., Hidayana, B., Mariana, D., Kusumah, M. P., Sukasmanto, Angga, R. D., . . . Shabia, G. N. (2020). *Buku Panduan Pengembangan Ekonomi Kawasan Pedesaan*. Yogyakarta: IRE.
- Sutoro, E. (2015). *REGULASI BARU, DESA BARU : Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, PDTT.
- Yudha, V. (2019). *Participatory Rural Appraisal Dalam Praktik Desa Wisata*. Retrieved April 1, 2022, from <https://www.desabisa.com/participatory-rural-appraisal-dalam-praktik-desa-wisata/>